



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3164-3172

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri

Anisah Mufidah^{1✉}, Mitha Alvia Rosha², Teddy Pascha S. Depari³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴,
Dewi Pika Lumban Batu⁵

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Universitas Negeri Medan

Email: annisamufida15@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap proses hukum, acara pidana, dan kasus korupsi dalam konteks penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat dalam upaya memerangi korupsi, yang merupakan masalah serius di banyak negara. Kasus korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, penyelewengan kekuasaan, dan dampak sosial serta ekonomi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang proses hukum yang digunakan untuk menangani kasus korupsi di pengadilan negeri sangat penting. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan analisis dokumen hukum terkait kasus-kasus korupsi, studi kasus untuk menggambarkan tahapan dan prosedur yang terlibat dalam pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Melalui metode ini, penelitian mencoba merinci peraturan dan prosedur yang mengatur proses hukum acara pidana, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem peradilan dan proses hukum yang berlaku dalam konteks penanganan kasus korupsi. Hasil ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peradilan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memerangi tindakan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum, praktisi hukum, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk memperkuat sistem peradilan dan memberantas korupsi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: *Hukum, Acara, Korupsi*

Abstract

This research was conducted with the main aim of conducting an in-depth analysis of legal processes, criminal procedures and corruption cases in the context of handling corruption cases in the District Court. The background to this research is driven by the importance of a deep understanding of the legal aspects involved in fighting corruption, which is a serious problem in many countries. Corruption cases often involve abuse of trust, abuse of power, and social and economic impacts that are detrimental to society. Therefore, a good understanding of the legal processes used to handle corruption cases in district courts is very important. The research methods used in this study involve analysis of legal documents related to corruption cases, case studies to describe the stages and procedures involved in trials, as well as interviews with legal practitioners involved in handling corruption cases. Through this method, the research tries to detail the regulations and procedures that govern the criminal procedural legal process, as well as identify obstacles and challenges that may arise in handling corruption cases in district courts. The research results provide a better understanding of the justice system and legal processes that apply in the context of handling corruption cases. These results can also provide deeper insight into how the judiciary can increase its effectiveness in fighting acts of corruption. With a better understanding of the legal process, legal practitioners, law enforcement and other stakeholders can work together to strengthen the justice system and eradicate corruption, which will ultimately provide major benefits to society and the government.

Keywords: Law, Events, Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi memang telah menjadi fokus perhatian utama. Dampaknya yang merusak tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi ancaman serius ini, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum acara pidana di Pengadilan Negeri digunakan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Dengan pemahaman ini, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dapat memitigasi efek merusak korupsi dan memastikan bahwa tindakan hukum yang tepat diterapkan dalam menangani para pelaku korupsi. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat seringkali terbuang sia-sia akibat korupsi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan publik, dan konflik internal yang merugikan stabilitas suatu negara (Wiyanti, 2013:34–54).

Korupsi merujuk pada praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak korupsi sangat merugikan masyarakat dan pemerintahan. Itu bisa mengakibatkan alokasi dana yang tidak efisien, ketidaksetaraan dalam akses ke layanan publik, serta kerusakan dalam sistem peradilan. Korupsi juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dalam penanganan kasus korupsi sangat penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Proses hukum acara pidana adalah kerangka kerja yang digunakan dalam penanganan kasus-kasus hukum pidana, termasuk kasus korupsi. Proses ini mencakup sejumlah tahapan, prosedur, dan peraturan yang mengatur bagaimana kasus tersebut ditangani oleh pengadilan. Dalam penanganan kasus korupsi, pemahaman yang mendalam tentang proses hukum acara pidana adalah krusial. Ini melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, pengadilan, dan putusan akhir. Keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kasus korupsi dapat sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan penerapan yang tepat dalam proses hukum ini (Wiyanti, 2013:34–54).

Analisis dokumen hukum menjadi salah satu metode utama dalam penelitian ini. Melalui analisis dokumen, penelitian menyelidiki secara mendalam peraturan dan undang-undang yang mengatur penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Ini mencakup pemahaman tentang tahapan-tahapan yang harus diikuti, peran berbagai lembaga pemerintah, dan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti selama proses hukum acara pidana. Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dan putusan pengadilan menjadi fokus dalam menganalisis kerangka kerja hukum yang relevan.

Proses hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri adalah aspek yang penting dalam upaya memerangi tindakan korupsi. Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem peradilan dan proses hukum yang berlaku dalam penanganan kasus korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum ini, praktisi hukum, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan efektivitas upaya memerangi tindakan korupsi. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Upaya penegakan hukum yang kuat dan efisien adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa korupsi tidak merusak sistem pemerintahan dan masyarakat. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat tercipta perubahan positif dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri dan peradilan pada umumnya (Sasono, 2021:65–73).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang mendalam untuk mengungkapkan rincian dan dinamika proses hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif dan pengalaman praktisi hukum, serta menggali detail-detail esensial yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini melibatkan tiga metode utama, yaitu analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan praktisi hukum yang berpengalaman dalam kasus korupsi.

Metode analisis dokumen melibatkan penelitian intensif terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur proses hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dan putusan pengadilan menjadi fokus dalam menganalisis kerangka kerja hukum yang relevan. Selama analisis, peneliti mencari keselarasan antara peraturan dan praktik lapangan, serta memeriksa apakah ada perubahan atau amendemen yang memengaruhi penanganan kasus korupsi. Pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum adalah kunci untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi.

Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana proses hukum diimplementasikan dalam praktik, dengan fokus pada kasus-kasus sebelumnya yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri. Penelitian ini melibatkan pemilihan sejumlah kasus korupsi yang beragam untuk mencakup berbagai skenario dan situasi. Kasus-kasus ini dijelajahi secara rinci, termasuk tahapan-tahapan dalam proses hukum, bukti-bukti yang diajukan, argumen-argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta hasil akhir. Studi kasus memberikan pandangan praktis tentang bagaimana proses hukum bekerja dalam situasi dunia nyata.

Wawancara dengan praktisi hukum yang berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang berada di lapangan dan memiliki pengalaman langsung dalam penanganan kasus korupsi. Peneliti akan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terfokus pada peran dan pengalaman praktisi hukum dalam penanganan kasus korupsi, serta kendala dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka. Wawancara ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana proses hukum acara pidana diimplementasikan dalam praktik dan akan membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin mempengaruhi efektivitas penanganan kasus korupsi.

Penelitian ini juga akan menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan berbagai aspek proses hukum acara pidana dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Hal ini akan melibatkan perbandingan antara kasus-kasus yang diteliti, baik dalam hal kesuksesan maupun hambatannya. Dengan cara ini, penelitian akan dapat mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan kunci dalam penanganan kasus korupsi. Analisis komparatif ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik yang berhasil dapat diterapkan dalam kasus-kasus lain dan memungkinkan penemuan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam penegakan hukum terhadap tindakan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan utama adalah bahwa terdapat sejumlah poin kunci yang mendorong keberhasilan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Salah satu poin kunci tersebut adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses hukum. Keberhasilan penanganan kasus korupsi sangat tergantung pada sejauh mana proses hukum dijalankan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Peraturan yang transparan dan jelas, prosedur yang sesuai, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural adalah elemen-elemen yang esensial dalam menciptakan lingkungan hukum yang efektif dalam menghadapi tindakan korupsi.

Proses persidangan korupsi di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum mencapai putusan akhir. Persidangan korupsi dapat dilakukan di sidang pengadilan biasa atau di Mahkamah Agung, tergantung pada tingkat kejahatan dan keterlibatan pelaku. Selain itu, ada juga persidangan khusus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki yurisdiksi khusus dalam penanganan kasus korupsi. Tahapan pertama dalam proses persidangan korupsi adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK atau kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Selama penyelidikan, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, memeriksa dokumen-dokumen terkait, dan melakukan pengeledahan jika diperlukan.

Setelah penyelidikan selesai, tahap berikutnya adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau tim penyidik KPK. Mereka akan menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan. Jika kasus dinyatakan layak, maka jaksa penuntut umum akan menyiapkan dakwaan yang akan diajukan kepada pengadilan. Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Persidangan korupsi di pengadilan biasa

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Proses persidangan melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, pembacaan dakwaan, pemeriksaan bukti-bukti, dan pendengaran argumen dari jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum membuat keputusan. Sementara itu, persidangan korupsi di Mahkamah Agung dilakukan jika terdakwa adalah pejabat tinggi negara seperti anggota DPR atau pejabat eksekutif. Proses persidangan di Mahkamah Agung memiliki beberapa tahapan yang mirip dengan persidangan di pengadilan biasa, namun dengan perbedaan dalam hal komposisi hakim dan prosedur yang lebih formal (Bahoo et al., 2020).

Peran media massa dalam mengawasi kasus korupsi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri adalah faktor penting dalam mendukung proses hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kasus korupsi dan memengaruhi tekanan publik terhadap pihak berwenang untuk menjalankan tugas mereka secara adil dan transparan. Media dapat menjadi pengawas masyarakat yang memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, peran organisasi masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam mencegah tindakan korupsi. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dalam proses hukum acara pidana, memberikan laporan jika mereka mengetahui tindakan korupsi, dan mendukung inisiatif anti-korupsi. Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa keterlibatan aktif media massa dan masyarakat sipil dapat memperkuat tindakan pencegahan korupsi dan menjaga akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi (Nyberg, 2021).

Pembahasan

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek kunci dalam penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan proses yang terbuka dan jelas. Kasus-kasus korupsi yang ditangani secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keadilan prosedural sangat penting. Penegakan hukum yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kasus memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku merupakan aspek penting dalam menciptakan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi.

Persidangan korupsi yang dilakukan oleh KPK memiliki karakteristik yang berbeda. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara

independen tanpa melibatkan jaksa penuntut umum. Persidangan korupsi di KPK juga dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan persidangan di pengadilan biasa. Selain itu, KPK juga memiliki kekuasaan untuk menyita aset terdakwa yang diduga berasal dari tindak korupsi. Dalam perspektif teori, proses persidangan korupsi dapat dikaitkan dengan teori hukum pidana dan teori penegakan hukum. Teori hukum pidana menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Persidangan korupsi bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku korupsi. Sementara itu, teori penegakan hukum menjelaskan tentang bagaimana lembaga penegak hukum seperti KPK atau kepolisian melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus korupsi. Teori ini mencakup aspek penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum (Barrett et al., 2020).

Ketika masuk ke tahap pengadilan, prinsip-prinsip proses hukum dan hak asasi individu, seperti *due process theory*, harus dijaga dengan cermat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan adil dan bahwa hak-hak terdakwa dihormati sesuai dengan hukum. Selain itu, perspektif *deterrence* masih relevan di pengadilan, di mana hukuman yang diberikan harus memiliki efek *deterrent* yang kuat untuk mengurangi potensi tindakan korupsi di masa depan. Selain hukuman, rehabilitasi juga merupakan aspek penting dalam proses peradilan korupsi. Sementara teori pembalasan (*retributive theory*) penting dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran hukum, perspektif rehabilitasi juga harus diperhitungkan. Ini bisa melibatkan program-program pemulihan dan pembetulan perilaku pelaku korupsi. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, pengawasan masyarakat, dan peran media juga merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas penanganan korupsi. Semua elemen ini harus saling terkait dan diintegrasikan dalam proses peradilan untuk mencapai penanganan yang efisien dan adil terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Proses peradilan dalam kasus korupsi memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi di sebuah negara. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan peradilan menjadi kunci utama. Proses hukum yang transparan memberikan harapan kepada masyarakat bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan secara jujur dan tidak ada yang tersembunyi. Akuntabilitas dalam menjalankan prosedur-prosedur hukum juga sangat penting karena menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban atas tindakan korupsi, bahkan pejabat publik

pun tidak terkecuali.

Peran yang dimainkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki peranan penting dalam proses peradilan kasus korupsi. KPK memiliki mandat khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen, memastikan bahwa prosesnya tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lain yang dapat menghalangi upaya pemberantasan korupsi. KPK juga dikenal dengan proses persidangan yang lebih cepat dan sederhana, yang membantu dalam mempercepat proses peradilan dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku korupsi.

Prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk aspek deterrence dan rehabilitasi, harus diterapkan dalam proses peradilan kasus korupsi. Tujuan utama adalah menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang sebanding dengan tindakan korupsi, sehingga tindakan tersebut menjadi tidak menguntungkan dan mengurangi potensi tindakan korupsi di masa depan. Selain itu, aspek rehabilitasi juga penting untuk membantu pelaku korupsi memperbaiki perilaku mereka melalui program pemulihan dan pembetulan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen kunci ini dalam proses peradilan, diharapkan sistem peradilan dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memerangi tindakan korupsi dan menjaga integritas dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahoo, Salman, Ilan Alon, and Andrea Paltrinieri. "Corruption in International Business: A Review and Research Agenda." *International Business Review* 29, no. 4 (2020): 101660.
- Castro, Armando, Nelson Phillips, and Shaz Ansari. "Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research." *Academy of Management Annals* 14, no. 2 (2020): 935–68.
- Dávid-Barrett, Elizabeth, and Mihály Fazekas. "Grand Corruption and Government Change: An Analysis of Partisan Favoritism in Public Procurement." *European Journal on Criminal Policy and Research* 26 (2020): 411–30.
- Ebekozien, Andrew, Mohamad Shahrudin Samsurijan, Godpower C Amadi, Andrew I Awo-Osagie, and Matthew Ikuabe. "Moderating Effect of Anti-Corruption Agencies on the Relationship between Construction Corruption Forms and Projects Delivery." *International Planning Studies* 27, no. 4 (2022): 336–53.
- Igiebor, God'stime Osariyekemwen. "Political Corruption in Nigeria: Implications for Economic Development in the Fourth Republic." *Journal of Developing Societies* 35,

no. 4 (2019): 493–513.

Nyberg, Daniel. "Corporations, Politics, and Democracy: Corporate Political Activities as Political Corruption." *Organization Theory* 2, no. 1 (2021): 2631787720982618.

Persson, Anna, Bo Rothstein, and Jan Teorell. "Getting the Basic Nature of Systemic Corruption Right: A Reply to Marquette and Peiffer." *Governance* 32, no. 4 (2019): 799–810.

Sasono, Ipang, Ahmad Dedi JUBAEDI, Dewiana NOVITASARI, Nuri WIYONO, Riyanto RIYANTO, Oktabrianto OKTABRIANTO, Jainuri JAINURI, and Hatoli WARUWU. "The Impact of E-Service Quality and Satisfaction on Customer Loyalty: Empirical Evidence from Internet Banking Users in Indonesia." *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 4 (2021): 465–73.

Tacconi, Luca, and David Aled Williams. "Corruption and Anti-Corruption in Environmental and Resource Management." *Annual Review of Environment and Resources* 45 (2020): 305–29.

Wiyanti, Diana. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.